

PENGUATAN LITERASI PUBLIK DALAM ERA MASYARAKAT DIGITAL

Benediktus Denar

STIPAS St. Sirilus Ruteng

Email: bennydenar@yahoo.com

Abstract:

One of the main factors that support the changing world today is the development of information and communication technology which is increasingly sophisticated. In Indonesia, the advancement of information technology has had a significant impact on democracy. This article argues that a dignified democracy requires the quality of public literacy. Good literature will bear to citizens who think critically, rationally, constructively, and have the depth and breadth of insight. The creation of literacy culture should be very real in educational institutions, especially in higher education institutions. Without literacy, the world of education is like a soulless body.

Keywords:

Democracy, Information, Literacy, Higher Education

Pengantar

Salah satu faktor utama yang menunjang perubahan dunia saat ini adalah semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Futuris Alfin Toffler menyebut perubahan dunia saat ini

sudah memasuki gelombang ketiga atau dikenal dengan “*the third wave society*”¹ (masyarakat gelombang ketiga) yaitu zaman teknologi informasi dan komunikasi. Zaman ini ditandai informasi sebagai kebutuhan utama. Kosekuensinya, kemampuan menggunakan serta memanfaatkan teknologi menjadi sebuah keterampilan wajib yang harus dikuasai. Pada era globalisasi, dunia dibombardir oleh banyaknya informasi yang beredar, mengalir secara deras, dan hampir tak terbendung. Saat ini, kita hidup di dunia yang sesak oleh media yang memungkinkan terjadinya transparansi informasi dan membuat kita dengan mudah mengaksesnya kapan dan di mana saja.

Fenomena ini amat memengaruhi seluruh dimensi kehidupan, termasuk dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Paling kentara, di Indonesia kemajuan teknologi informasi telah berdampak cukup signifikan terhadap demokrasi. Di satu sisi, dia sangat membantu proses deliberasi publik, namun di sisi lain dia justru menjadi corong penyebaran *hoaks* yang bermotif kebencian berbasis SARA, demi kepentingan politik dan golongan, tetapi mengorbankan kebhinekaan bangsa.² Persoalan-persoalan ini akan menjadi fokus pembedahan tulisan ini dan akan mengerucut penunjukkan literasi publik (termasuk mahasiswa) sebagai tiang penyangga bagi penyebaran informasi yang sehat dan untuk demokrasi yang semakin bermartabat.

Kontribusi Teknologi Informasi Bagi Demokrasi

Seperti dijelaskan sebelumnya, perkembangan media informasi dan komunikasi kini berjalan kian cepat. Seiring dengan membanjirnya produksi alat telekomunikasi dengan beragam aplikasi semakin memudahkan komunikasi. Semua itu telah turut memengaruhi pola komunikasi

1 Dikutip dalam; Sapriya, *Mampu Beradaptasi Terhadap Perubahan dan Peluang Kerja Di Era Global*, Modul Pendidikan SMK, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Depertemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 11.

2 Bahkan saat ini, informasi bohong atau *hoaks* telah menjadi ladang bisnis yang beririsan dengan kepentingan politik dan berpotensi memecah belah bangsa. Secara nyata bisnis *hoaks* ini dilakukan oleh kelompok Saracen. Lihat, “*Hoaks Menjadi Ladang Bisnis*”, *Headline dalam Kompas*, Jumaat 25 Agustus 2017.

dan sistem penyebaran informasi, termasuk cukup kentara terlihat dalam pola komunikasi dan sistem penyebarluasan informasi politik. Pengaruh tersebut terlihat dalam beberapa indikasi.³ *Pertama*, kecanggihan internet membuat kekuasaan dengan mudah diterawang rakyat, karena penyebarluasan informasi seputar kekuasaan menjadi begitu transparan dan amat gampang diakses publik. Sebab pada era internet, komunikasi bisa berlangsung multiarah dan kolektif, serta melibatkan banyak kalangan.

Kedua, media sosial sebagai perkembangan dari teknologi internet merupakan sarana baru yang memberikan alternatif bagi komunikasi dinamis kepada masyarakat. Bahkan media sosial berkemampuan membentuk opini publik. Adanya opini publik dengan *snowball effect* akan sangat mungkin mendorong sikap dan perilaku publik atas isu politik atau figur dan partai politik tertentu.

Justru di sinilah titik krusial peran media sosial. Dalam banyak hal, media sosial terbukti ampuh mengatasi defisit demokrasi. Sebab dengan sistem komunikasi multiarah yang dimilikinya, media sosial sangat membantu meningkatkan partisipasi dan proses deliberasi publik yang mana hal tersebut merupakan prasyarat dasar bagi tegaknya demokrasi. Rheingold dalam bukunya *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier* (1993)⁴, misalnya, percaya bahwa melalui media sosial, orang akan lebih terlibat dalam proses demokrasi, seperti meningkatkan debat-debat *online* tentang isu politik atau perihal figur politisi tertentu. Selain itu, media sosial juga memungkinkan tersedianya fasilitas jaringan sosial luas bagi kegiatan komunikasi antara penyelenggara kekuasaan dengan masyarakat. Melalui media sosial yang tersedia, masyarakat bisa dengan leluasa meminta kejelasan informasi, menuntut transparansi, mengaktualisasikan kebebasan berpendapat dengan lebih leluasa dan cepat mengajukan saran serta kritik. Justru di sinilah pilar demokrasi yakni partisipasi dan deliberasi publik dapat ditegakkan.

3 Benny Denar, "Dilema Demokrasi Versi Media Sosial", Opini dalam *Flores Pos*, Kamis 2 Februari 2017.

4 Seperti dikutip dalam Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 138-139.

Secara khusus, dalam banyak kajian menunjukkan bahwa kaum muda yang sebelumnya dianggap kurang peka terhadap persoalan-persoalan politik, kini justru lebih aktif dan hal itu ditengarai karena media sosial yang mereka gunakan. Melalui media sosial, kaum muda apalagi generasi Y⁵ dapat dengan mudah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan. Media sosial memungkinkan kaum muda bisa menyalurkan daya kritisnya terhadap kekuasaan, sekaligus dengan mudah melacak perilaku dan rekam jejak elite politik. Jadi melalui media sosial, proses deliberasi dan penyaluran aspirasi publik bisa berjalan, sekaligus menjadi catatan kritis terhadap pilar-pilar demokrasi yang telah ada. Kenyataan ini sekaligus semakin menegaskan posisi media sosial sebagai pilar kelima demokrasi, setelah pers yang disebut-sebut pilar keempat sebagai penyeimbang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Titik Rawan Demokrasi Versi Media Digital

Walau terbukti berhasil meningkatkan deliberasi dan partisipasi publik, namun perlu disadari bahwa antusiasme berdemokrasi di media sosial justru menimbulkan dilema yang tidak ringan.⁶ Euforia penggunaan media sosial atas nama kebebasan berekspresi melahirkan demokrasi penuh paradoks yang dampaknya sering tak terkendali. Sebab dalam kenyataan, semangat berdemokrasi yang luar biasa di media sosial justru disertai oleh kemunculan tanda-tanda pengacauan demokrasi itu sendiri, seperti tampak nyata dalam penyebaran informasi palsu dan bahkan sesat. Kini, penyebaran berita palsu dan sesat itu justru meluber tanpa terkendali ke ruang publik. Euforia media sosial sering mengabsenkan filosofi utama demokrasi, yakni kebebasan berbasis pengetahuan, keterampilan dan etika.

Selain itu, penyebaran informasi palsu dan sesat juga berdampak terhadap tergerusnya intelektualitas dan akal sehat publik. Anehnya, bukan hanya orang tidak terpelajar yang melahap dan menyebarkan berita palsu atau sesat, tetapi juga mengikis intelektualitas kaum terpelajar, bahkan

5 <https://www.femina.co.id/article/ciri-khas-gen-y->, diakses pada 16 Oktober 2016.

6 Benny Denar, *loc.cit*

orang-orang berpendidikan tinggi sekalipun. Mereka yang semestinya bersikap kritis dan bijaksana terhadap berita atau informasi, malah menjadi pelaku dan penyebar informasi sesat dan palsu tersebut.

Dalam dunia nyata, media sosial kerap menjadi corong penyebaran informasi sesat dan palsu yang berpotensi merusak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang asasi. Media sosial kerap berdaya rusak tinggi karena terlampau digunakan untuk menyebarkan berita atau opini berbau provokasi berbasis SARA, penghinaan pribadi, kampanye hitam dan tak jarang menimbulkan kegaduhan serta gejolak sosial yang kian meresahkan dan bahkan membahayakan persatuan dan toleransi.⁷ Secara konkret, media sosial justru menjadi arena benturan kepentingan politik yang dikemas melalui aroma agama dan ujaran kebencian.

Pada titik lain, euforia media sosial ini sering melahirkan ironi demokrasi, yakni melahirkan elite politik baru dan karbitan yang sering kali tampil bukan karena pengetahuan, keterampilan politik serta kenegarawanannya, melainkan hanya karena kemampuan pameran perhatian mengelola massa dalam kultur media sosial. Pada titik inilah, demokrasi versi media sosial menimbulkan dilema besar. Pada satu titik dia membantu meningkatkan partisipasi dan deliberasi publik, namun di sisi lain justru menggembosi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Karakter Masyarakat Digital⁸

Dilema demokrasi versi media sosial seperti dijelaskan di atas secara jelas dapat digambarkan dengan melihat ada 3 karakter umum masyarakat digital. *Pertama*, masyarakat digital berkesadaran semu. Mereka ini adalah golongan yang aktif menikmati dan mengonsumsi berbagai produk-produk kapitalisme, tetapi biasanya apatis terhadap masalah lingkungan sosial politik. *Kedua*, masyarakat digital sinistik. Karakter masyarakat digital seperti ini biasanya memberikan porsi kritik terhadap masalah lingkungan sosial politik, tetapi tidak memiliki kecukupan pengetahuan

7 Lihat, "Kebohongan Jadi Industri, Tajuk Rencana", Kompas 25 Agustus 2017.

8 Lihat, Novri Susan, "Parsialisme Elite Politik", Opini dalam Kompas, Jumaat 22 September 2017

dan visi konstruktif. Kelompok masyarakat seperti ini yang membuat ruang publik digital dipenuhi oleh pernyataan yang mencedraai substansi demokrasi, seperti stigmatisasi, caci maki, sampai fitnah karakter personal.

Ketiga, masyarakat digital kritis yang memiliki cadangan pengetahuan cukup serta memiliki komitmen terhadap substansi demokrasi, seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan nirkekerasan. Karakter masyarakat digital seperti ini biasanya memberi porsi besar terhadap praktik kritis yang mengontrol masalah lingkungan sosial politik. Argumentasi mereka berdasarkan pada akar pengetahuan yang sah dan mendalam terkait isu yang sedang dijadikan sebagai obyek wacana. Sayangnya, kelompok masyarakat seperti ini adalah minoritas. Akibatnya wacana kritis berbaur dalam keriuhan dominasi konsumsi dan sinisme. Hal ini menyebabkan wacana kritis terhadap parsialisme politik⁹ terancam mengalami peminggiran dan pemusnahan.

Masyarakat dengan Kultur Baca Lemah

Kemudahan peminggiran dan pemusnahan wacana kritis dan diganti *hoaks* gampang terjadi karena memang minat baca masyarakat kita masih amat lemah. Beberapa contoh studi membenarkan hal tersebut.¹⁰ Pertama, *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2015 menempatkan Indonesia di urutan ke-69 dari 76 negara yang disurvei. Kedua, *Central Connecticut state university* pada Maret 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 56 dari 60 negara dalam hal minat baca. Ketiga, survei yang dilakukan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menyimpulkan minat baca bangsa Indonesia menempati posisi kedua terendah dari 61 negara yang disurvei.

Sialnya, minat baca yang rendah ini juga terjadi dalam diri kaum yang dikategorikan intelektual, terutama pelajar dan mahasiswa. Bahkan

9 Norma paling umum dari parsialisme politik, menurut Susan Mendus, dalam bukunya *Impartiality in Moral and Political Philosophy* (2002) adalah memperjuangkan serta melindungi kepentingan kelompok.

10 Temuan ini diangkat oleh Agus Rifai. Bdk. Agus Rifai, "Menjadi Bangsa Pembaca", oipni dalam Kompas, Jumaat 22 September 2017

akibat malas membaca berdampak bahwa mahasiswa sekarang kurang berkecakupan dalam menulis. Kelemahan dalam dua kemampuan dasar ini (baca dan tulis) membuat mahasiswa gampang jatuh dalam sikap dan perilaku yang justru kontra akademis seperti plagiarisme. Selain itu, akibat lemahnya kemampuan baca dan tulis, mahasiswa juga sering kurang mampu mengartikulasikan fenomena sosial yang ada. Mereka tidak mampu berpikir kritis, tidak peka terhadap lingkungan sekitar, tidak mampu mengatasi masalah yang ada, tidak kreatif dan terkadang hanya ikut-ikutan. Berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan dalam hal ini adalah kemampuan melihat wacana yang sedang berkembang. Mereka terlihat lesu terhadap perkembangan isu-isu kemasyarakatan, negara, dan global. Maka akhirnya, timbullah fenomena seperti pembicaraan tak berbobot, tindakan ikut-ikutan, tidak kreatif, dan tidak produktif. Kampus dan mahasiswa yang tidak memiliki kultur literasi (baca dan tulis) merupakan gambaran nyata dari pengangguran intelektual.

Mengembalikan Semangat Literasi

Dalam Bahasa Inggris *literary* berarti melek huruf, tidak buta aksara.¹¹ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, hanya ada kata literatur yang berarti kepustakaan.¹² Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai pengenalan atau kemampuan berkaitan dengan keberaksaraan (tidak buta aksara). Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Namun sekarang literasi memiliki makna yang cukup luas, termasuk berkaitan dengan literasi computer (*computer literacy*), literasi media (*media literacy*), literasi teknologi (*teknologi literacy*), literasi ekonomi (*economy literacy*), literasi informasi (*information literacy*), termasuk literasi moral (*moral literacy*). Jadi literasi atau keberaksaraan merupakan suatu kesanggupan untuk mengenal dan menggunakan teknologi, informasi, sanggup berpikir kritis dan konstruktif, peka terhadap lingkungan dengan segala masalahnya, termasuk cakap dalam berkontribusi bagi peradapan

11 John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan XXVIII, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 361.

12 W.J.J. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 712.

politik yang baik. Dengan demikian seseorang dapat dikatakan sebagai literat, apabila dia sanggup memahami sesuatu dengan benar karena telah membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu sesuai pemahamannya terhadap isi bacaan yang dibacanya.

Dengan penjelasan ini, maka kita dapat melihat betapa literasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Pemerintah dan negara ini juga sudah menyadarinya. Pada 14 September 2017 lalu, Presiden Jokowi meresmikan gedung layanan Perpustakaan Nasional. Peresmian ini bertepatan dengan bulan gemar membaca nasional dan hari kunjung perpustakaan (Hari kunjung perpustakaan ditetapkan setiap 14 September). Bulan September sebagai bulan gemar membaca dan tanggal 14 September hari kunjung perpustakaan telah ditetapkan sejak tahun 1995 oleh presiden Suharto. Tujuannya adalah meningkatkan minat baca bangsa Indonesia yang masih rendah.

Dengan menetapkan hari dan bulan baca nasional, maka dapat ditangkap pesan bahwa isu minat dan budaya baca merupakan isu kebangsaan. Bangsa yang cerdas adalah bangsa pembaca. Bangsa pembaca adalah bangsa yang menjadikan kegiatan membaca sebagai bagian dari kehidupannya. Masyarakat atau bangsa pembaca memiliki karakteristik sebagai berikut¹³; *pertama*, bangsa pembaca adalah bangsa yang terbebas dari buta aksara termasuk kemahiran membaca verbal. Data menunjukkan masih terdapat 2,07 persen atau sekitar 3,4 juta masyarakat Indonesia buta huruf. *Kedua*, bangsa pembaca adalah bangsa dengan budaya membaca yang tinggi. Budaya membaca merupakan budaya yang cerdas, budaya bangsa yang maju.

Ketiga, bangsa pembaca adalah bangsa yang mampu menggunakan apa yang dibacanya untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Membangun bangsa pembaca tidak boleh berhenti pada peningkatan keaksaraan dan minat membaca. Namun yang lebih penting adalah membangun mental dan kultur membaca. Orang yang memiliki mental membaca selain mengetahui kebutuhan diri akan bahan bacaannya, juga mampu memilih dan memilah apa yang dibacanya. Dia mampu membedakan kebenaran

13 Agus Rifai, *loc.cit.*

isi yang dibacanya dan tidak mudah menyebarkan hasil bacaannya sebelum meneliti kebenarannya. Ia tidak mudah percaya dengan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya (*hoaks*), apalagi menyebarkannya. Selain itu, bangsa pembaca adalah bangsa cerdas yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif berdasarkan pengetahuan dan hasil bacaan yang dimilikinya. Mereka dapat secara bijak memanfaatkan pengetahuan hasil bacaan untuk kehidupannya agar kehidupan sekitar lebih baik. Dengan kata lain, bangsa pembaca adalah bangsa cerdas yang mampu membangun peradaban berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya. Sejarah membuktikan hanya bangsa pembaca yang bisa jadi bangsa maju dan memiliki peradaban yang dapat dibanggakan.

Mahasiswa dan Kultur Literasi

Sebelum melihat pentingnya kultur literasi bagi mahasiswa, terlebih dahulu kita melihat identitas substantif dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Pertanyaan pokoknya adalah apa yang menentukan ke-maha-an seorang siswa? Apa yang menentukan ke-tinggi-an sebuah perguruan yang membedakannya dari ke-dasar-an dan ke-menengah-an kategori perguruan lainnya? UU No. 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membuat definisi formal dan deskriptif perihal perguruan tinggi. Dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang tersebut ditulis, “pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi”.

Definisi ini jelas tidak mengatakan apa-apa tentang isi/substansi sesungguhnya perguruan tinggi. Sebab dari segi isi/substansi, perguruan tinggi merupakan lembaga pendalaman penalaran dan keilmuan. Jadi yang menentukan ke-tinggi-an sebuah perguruan dan ke-maha-an seorang siswa adalah kedalaman telaahannya yang didukung oleh penalaran yang kuat.

Penalaran yang kuat paling kurang diukur dari dua hal.¹⁴ Pertama, kemampuan berpikir berdasarkan kaidah logika yang berlaku. Memiliki

14 Paulus Budi Kleden, “Pola Pembinaan Mahasiswa Berbasis Penalaran dan Keilmuan” Makalah disampaikan di Ledalero pada Kamis, 4 September 2009.

koherensi dan konsistensi pikiran. Sanggup berargumentasi secara runut dan runtut, tidak melompat gagasan. Nalar yang baik sanggup menangkap, memilah dan menstrukturisasi informasi. Dari perspektif nalar, intelektualitas seseorang tidak ditentukan akumulasi informasi dimilikinya, tetapi oleh kemampuan membuat kategorisasi dan menstrukturisasi informasi dalam sistem pengetahuan.

Kedua, nalar yang baik juga ditentukan oleh kesanggupan mengkomunikasikan gagasan. Seorang yang memiliki nalar yang baik akan sanggup mengkomunikasikan gagasannya dengan cara yang gampang dipahami. Orang yang bernalar baik akan sanggup membuat penilaian yang tepat atas diri sendiri, orang lain dan dunia, serta sanggup memberikan kontribusi bagi masyarakat. Orang bernalar akan sanggup menjadi rekan bagi sesamanya, sanggup berbicara banyak hal dan tentang banyak bidang. Nalar yang baik mengantar orang untuk bebas dari isolasi diri dan bidang keahlian sendiri, tetapi sanggup berkomunikasi dan bergaul dengan semua orang. Nalar yang baik membuat orang memiliki kemampuan umum dan menjadikannya sebagai bagian dari masyarakat umum.¹⁵

Pendalaman penalaran dan keilmuan tidak muncul dengan sendirinya. Mahasiswa yang ingin memiliki pendalaman penalaran dan keilmuan mesti membiasakan diri bersikap dan berkultur ilmiah. Kultur ilmiah itu paling kurang ditandai oleh beberapa hal; memiliki dan menghidupkan motivasi studi, menghidupkan daya kritis; sikap bertanya dan mempertanyakan (apa yang dibaca, didengar, dilihat dan dialami), aktif dalam membuat tanggapan (tertulis atau lisan), terbiasa dalam forum-forum diskusi dan publikasi.¹⁶

Semua kesanggupan itu paling dasar didukung oleh kemampuan literasi; membaca dan menulis. Mahasiswa yang ingin bernalar dan berilmu bagus secara substantif mesti didukung oleh kultur membaca dan menulis. Bahkan patut dikatakan bahwa membaca dan menulis adalah roh dalam

15 MiKhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan. Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, (Maumere: Ledalero, 2007), p. 2.

16 Paulus Budi Kleden., *Loc.Cit.*

pendidikan tinggi, sekaligus identitas utama dari mahasiswa. Tanpa minat membaca dan menulis, pendidikan tinggi dan mahasiswanya bagaikan badan tanpa jiwa. Sebab adalah mustahil proses belajar dan mengajar dapat berhasil tanpa adanya kultur membaca dan menulis. Kultur literasi (baca dan tulis) juga sangat penting agar mahasiswa sanggup bergiat dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Dengan memiliki kultur membaca dan menulis, mahasiswa dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sanggup mentransferkannya dengan baik kepada orang lain. Dengan kultur literasi yang kuat maka akan lahir generasi yang berpikir rasional, kritis dan inovatif, berwawasan luas dan konstruktif, serta dapat mencegah diri dari reaksi-reaksi yang bersifat emosional.

Penutup

Demokrasi yang bermartabat membutuhkan literasi publik berkualitas. Sebab literasi yang baik akan melahirkan warga yang berpikir kritis, rasional, konstruktif, serta memiliki kedalaman dan keluasan wawasan. Apalagi dalam era masyarakat digital, kultur literasi menjadi sebuah keniscayaan jika tidak mau menjadi 'santapan empuk' dari melubernya informasi yang kepastian kebenarannya selalu harus diragukan. Kualitas literasi yang baik akan mendorong kemajuan peradapan bangsa.

Penciptaan kultur literasi mesti sangat nyata terjadi dalam lembaga pendidikan terutama dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Kampus dan mahasiswa harus menjadi pihak terdepan menghidupi kultur literasi. Sebab hanya dengan itulah identitas kampus dan mahasiswa akan kelihatan. Literasi menjadi modal dasar bagi kampus dan mahasiswa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Terutama bagi mahasiswa dan masyarakat akademik lainnya, literasi yang bagus menjadi penyangga utama bagi pengembangan penalaran dan keilmuan. Tanpa literasi dunia pendidikan bagaikan raga tanpa jiwa.

Rujukan

- Denar, Benny. “Dilema Demokrasi Versi Media Sosial” dalam *Flores Pos*, Kamis 2 Februari 2017.
- Dua, Mikhael. *Filsafat Ilmu Pengetahuan. Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialekti*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan XXVIII. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Kleden, Paulus Budi. “Pola Pembinaan Mahasiswa Berbasis Penalaran dan Keilmuan” (ms.) Ledalero, Kamis, 4 September 2009.
- Kompas*. “Hoaks Menjadi Ladang Bisnis” (Headline), Jumaat 25 Agustus 2017.
- Kompas*. “Kebohongan Jadi Industri” (Tajuk Rencana), Jumat 25 Agustus 2017. Mendus, Susan. *Impartiality in Moral and Political Philosophy*. 2002
- Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.J. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rifai, Agus. “Menjadi Bangsa Pembaca” dalam *Kompas*, Jumaat 22 September 2017
- Sapriya, *Mampu Beradaptasi Terhadap Perubahan dan Peluang Kerja Di Era Global*, Modul Pendidikan SMK. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Depertemen Pendidikan Nasional, 2004.
- Susan, Novri. “Parsialisme Elite Politik” dalam *Kompas*, Jumaat 22 September 2017.
- <https://www.femina.co.id/article/ciri-khas-gen-y->, diakses pada 16 Oktober 2016.